MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731/MENKES/SK/IV/2011

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan otonomi daerah secara nyata di Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu adanya dukungan dana pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan;

b. bahwa alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pelaksanaan program pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2011, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 152/MENKES/SK/I/2011, perlu diubah karena masih adanya dana tugas pembantuan yang belum terdistribusikan untuk program Pembinaan Upaya Kesehatan Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2011 dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

9. Peraturan Pemerintah ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan perubahan terakhir Peraturan Presiden No. 53 tahun 2010;

15. Peraturan Presiden ...

15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011.**

KEDUA ...

KEDUA : Alokasi dana dekonsentrasi di provinsi adalah untuk:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan
2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
4. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
5. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
6. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK).

KETIGA : Alokasi dana tugas pembantuan di Provinsi/ Kabupaten/Kota adalah untuk:

1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.

KEEMPAT : Ruang lingkup kegiatan masing-masing program sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KELIMA : Rincian alokasi anggaran masing-masing program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Ketiga untuk setiap satuan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

KEENAM : Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dialokasikan dalam DIPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi.

KETUJUH : Anggaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dialokasikan dalam DIPA SKPD Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Provinsi, Kabupaten dan Kota.

KEDELAPAN : Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 024 Kementerian Kesehatan Tahun 2011.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Petunjuk Pelaksanaan Program diterbitkan oleh masing-masing Unit Eselon-I penanggung jawab program terpisah dari keputusan ini.

KESEPULUH : SKPD wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan (fisik) dan realisasi anggaran bulanan dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah akhir bulan, laporan triwulan dengan batas waktu 1 (satu) minggu setelah akhir triwulan, dan laporan tahunan sebagai akhir pelaksanaan kegiatan (fisik) dan anggaran Tahun 2011 pada minggu pertama bulan Pebruari 2012.

KESEBELAS : Untuk keperluan penyusunan Laporan Keuangan atas realisasi anggaran dan pengelolaan Barang Milik Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di daerah (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan), diatur sebagai berikut :

1. Kepala SKPD wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi tingkat Satuan Kerja yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) untuk masing-masing DIPA Program, bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai ketentuan.
2. Gubernur/Bupati/Walikota wajib membentuk Unit Akuntansi Instansi tingkat Wilayah Provinsi/ Kabupaten/Kota yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W).

KEDUABELAS : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah (UAPPA/B-W), sebagaimana dimaksud Diktum kesebelas bertugas :

1. Menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan Laporan Keuangan masing-masing DIPA Program di Provinsi/Kabupaten/ Kota menjadi Laporan Keuangan tingkat Wilayah.
2. Menyampaikan Laporan Keuangan tingkat Wilayah kepada masing-masing Unit Eselon I sesuai ketentuan.

KETIGABELAS ...

KETIGABELAS : Laporan yang disampaikan oleh SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

KEEMPATBELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 152/Menkes/SK/I/2011 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
8. Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Kementerian Kesehatan
11. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731/MENKES/SK/IV/2011
TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

RUANG LINGKUP KEGIATAN
MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN — **Rp. 125.412.500.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan di daerah tahun 2011 disediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 125.412.500.000,-

Dana Dekonsentrasi ini digunakan untuk pelaksanakan kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL bahan Musrenbang, RKA-KL dan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan);
2. Penyusunan, pengolahan dan analisis serta pemutakhiran data profil provinsi, updating data puskesmas, visualisasi Puskesmas, visualisasi Rumah Sakit, penyusunan dan pengolahan dan analisia SIK Kab/Kota, pendidikan dan latihan (WEB, Database, GIS, Survei Cepat) dan ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) serta pencetakan profil provinsi dan pencetakan SIK Kabupaten/Kota;
3. Pengelolaan PTT, yang terdiri dari:
   a. Percepatan pembayaran gaji dan insentif tenaga PTT pusat;
   b. Rakon Kepegawaian;
   c. Pendataan Tenaga PTT;
4. Pengelolaan Satker (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Dinas Kesehatan Provinsi Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang – Wilayah Dekonsentrasi dan kegiatan lain dalam penyusunan laporan keuangan (Neraca, LAK, CaLK) Unit Akuntansi yang bersangkutan.
5. Penyusunan evaluasi kinerja (PP No. 39 Th. 2006), penyusunan laporan monitoring dan evaluasi DAK, penyusunan profil kesehatan (Provinsi dan Kabupate/Kota), dan evaluasi SPM Bidang Kesehatan.

6. Operasional dan honorarium tim koordinasi pengelola Jamkesmas tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
7. Menumbuhkan gerakan dan kemandirian masyarakat dalam kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko/permasalahan kesehatan yang ada dalam lingkungan desanya, yang difokuskan kepada:
   a. Penguatan kelembagaan desa siaga melalui:
      1) Penguatan/pembentukan forum koordinasi antar lintas sektor dan program di provinsi dan kabupaten/kota,
      2) Penggalangan kemitraan dengan Swasta/LSM,
   b. Pengembangan Model Desa Siaga,
   c. Penyebaran informasi kesehatan,
   d. Penggerakan dan pengorganisasian masyarakat melalui orientasi pengembangan desa siaga bagi kader dan tokoh masyarakat, untuk provinsi yang belum menyelesaikan target pengembangan desa siaga.
8. Memfasilitasi masyarakat dengan pengetahuan untuk menciptakan kemampuan untuk mencegah dan atau mengatasi masalah kesehatan yang dihadapinya dengan menggali seluruh potensi yang mereka miliki di lingkungan saat mereka berinteraksi, melalui:
   a. Penyebaran informasi kesehatan, dan
   b. Pengembangan pendekatan-pendekatan spesifik daerah;
9. Peningkatan Kapasitas Promosi Kesehatan yang diarahkan kepada:
   a. Penguatan dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi program melalui:
      1) Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi dengan kabupaten/Kota,
      2) Pembinaan/Fasilitasi Teknis kepada Kabupaten/Kota, dan
      3) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan.
   b. Peningkatan SDM Promosi Kesehatan.
10. Penyediaan Honorarium dan Operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan dekonsentrasi.

II. PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK **Rp. 1.360.187.654.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak di daerah tahun 2011 disediakan dana sebesar Rp. 1.360.187.654.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 327.514.685.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.032.672.969.000,-.

Dana Dekonsentrasi dalam rangka percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi/Balita melalui Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak yang diselenggarakan di daerah tahun 2011 termasuk Rupiah Murni (RM), Rupiah Murni Pendamping (RMP) dari Project PHLN DHS 2 Loan Nomor 2074-INO dan Nomor 2075-INO sejumlah Rp 34.912.064.000 (RM Rp 869.975.000, RMP Rp 12.318.948.000, Pinjaman Luar Negeri Rp. 21.723.141.000), NICE Project ADB Loan Nomor 2348-INO (SF) Rp 172.200.000.000 (RM Rp 0, RMP Rp 42.300.000.000, Pinjaman Luar Negeri Rp. 129.900.000.000).

Dana Dekonsentrasi utamanya diarahkan untuk:

1. Melanjutkan kegiatan prioritas 2010 melalui berbagai terobosan dan akselerasi kegiatan 2011;
2. Meningkatkan kemitraan dan sinergisme pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat;
3. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk;
4. Penanggulangan dan perbaikan gizi,
5. Peningkatan pendidikan gizi, serta
6. Pengelolaan Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Dinas Kesehatan Provinsi Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang – Wilayah Vertikal (Satuan Kerja Kantor Daerah) program tersebut termasuk penyusunan laporan keuangan.

Dana tersebut disediakan untuk:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (Renja-KL, RKA-KL,SRAA dan DIPA);
2. Pelayanan Kesehatan Ibu, dengan kegiatan utama:
   a. Peningkatan keterampilan manajemen pelayanan kesehatan ibu (DTPS);

b. Penguatan Perencanaan (P1), Pelaksanaan (P2) dan Pengawasan (P3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;

c. Penguatan analisis dan pemanfaatan data responsive gender tingkat provinsi dan kabupaten/kota terpilih dengan cakupan rendah;

d. Follow up PWS dan surveilans kematian ibu;

e. Penyusunan juklak/juknis (lokal spesifik) pelayanan antenatal terpadu, persalinan tenaga kesehatan, pelayanan nifas, pencegahan komplikasi, pelayanan KB dan perlindungan kespro yang responsive gender; dan

f. Koordinasi, kerja sama dan penggerakan LP/LS, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, LSM dan swasta dalam mendukung upaya percepatan angka kematian ibu;

3. Pelayanan Kesehatan Anak, dengan kegiatan utama:
   a. Pelatihan MTBS,
   b. Pelayanan neonatus dengan komplikasi,
   c. Pelayanan kesehatan bayi dan balita, dan
   d. Pelayanan kesehatan anak sekolah, remaja dan anak khusus.
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, dengan kegiatan utama:
   a. Pembinaan kesehatan tradisional alternatif dan komplementer;
   b. Sosialisasi dan advokasi program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer;
   c. Pengenalan metode program pelayanan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer;
   d. Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor, dan
   e. Pengendalian sentra P3T.
5. Pelayanan kesehatan kerja dan olah raga dengan kegiatan utamanya
   a. Tempat-tempat kerja menerapkan upaya kesehatan kerja dan
   b. Sarana pelayanan kesehatan melaksanakan kesehatan kerja;
6. Dukungan manajemen program bina gizi dan KIA, dengan kegiatan utama:
   a. Operasional Poskesdes dan
   b. Dukungan Sarana dan Prasarana;

7. Perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan utama:
   a. Pengolahan data program gizi;
   b. Penanggulangan kurang vitamin A (KVA);
   c. Penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY);
   d. Penanggulangan anemia gizi besi;
   e. Penanggulangan kurang energy protein (KEP);
   f. Pemantauan status gizi balita;
   g. Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu;
   h. Penyebarluasan informasi kesehatan dan gizi menuju keluarga sadar gizi (Kadarzi);
   i. Peningkatan penggunaan air susu ibu (ASI)

Dana Tugas Pembantuan dipergunakan dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas serta Manajemen BOK di Kabupaten/Kota, dengan kegiatan utama:

1. Perbaikan gizi masyarakat;
2. Kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana;
3. Imunisasi;
4. Promosi kesehatan;
5. Kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit.

Dana Tugas Pembantuan juga dipergunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pelayanan kesehatan dasare pasca bencana di Provinsi Sumatera Barat yang bersumber dari Project PHLN DHS 2 Loan Nomor 2074-INO dan Loan Nomor 2075-INO sebesar Rp. 128.117.969.000,-.

III. PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN **Rp. 1.700.730.000.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah tahun 2011 disediakan dana sebesar Rp. 1.700.730.000.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 19.800.000.000,- dan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 1.680.930.000.000,-.

Dana Dekonsentrasi ini dialokasikan untuk mencapai sasaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan, yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagi kesinambungan program

antara pusat dengan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit/laboratorium kesehatan daerah, dengan memperhatikan menu wajib dan atau menu pilihan.

Menu Wajib terdiri dari:

1. Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Provinsi,
2. Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran Program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit dan Labkes daerah di wilayah binaan,
3. Pertemuan Konsolidasi Penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Program Pembinaan Upaya Kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Rumah Sakit dan Labkes daerah di wilayah binaan dan
4. Pertemuan Konsolidasi Perencanaan DAK Bidang Kesehatan Rujukan, serta
5. Pengelolaan Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) Dinas Kesehatan Provinsi Program Pembinaan Upaya Kesehatan; dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang - Wilayah Vertikal (Satuan Kerja Kantor Daerah) program tersebut termasuk penyusunan laporan keuangan.

Menu Pilihan (Menu Direktorat) terdiri dari:

1. Pertemuan advokasi dan sosialisasi kebijakan program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan sarana kesehatan di daerah binaannya,
2. Monitoring, evaluasi, dan bimbingan teknis oleh dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan sarana kesehatan di daerah binaannya,
3. Pelatihan keterampilan operator dalam pemeliharaan peralatan di rumah sakit dapat difasilitasi oleh dinas kesehatan provinsi bersama BPFK (Balai Pengaman Fasilitas Kesehatan) kepada rumah sakit /Laboratorium Kesehatan di daerahnya,
4. Pertemuan advokasi dan sosialisasi software RKAKL program Pembinaan Upaya Kesehatan oleh dinas kesehatan provinsi kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dan sarana kesehatan di daerah binaannya.

Tugas Pembantuan merupakan Dana APBN yang didaerahkan di Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan. Pemanfaatan dana APBN yang didaerahkan di Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Tugas Pembantuan) dapat digunakan, untuk mencapai sasaran program Pembinaan Upaya Kesehatan, dilaksanakan dengan memperhatikan menu sebagai berikut :

1. Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat dalam rangka :
   a. Peningkatan mutu pelayanan 4 (empat) spesialis dasar (spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan dan kebidanan, spesialis bedah, dan spesialis anak) dan 3 spesialis penunjang (spesialis anestesi, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik) serta penunjang non medis (dapur, *Laundry, IPAL, CSSD*, dan lain-lain).
   b. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk peningkatan mutu pelayanan di kelas III RS (khusus untuk rumah sakit milik Provinsi).
   c. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan gawat darurat.
   d. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan untuk pelayanan PONEK termasuk pelayanan darah dan laboratorium.
   e. Akreditasi rumah sakit/laboratorium kesehatan.
   f. Pemenuhan kebutuhan dana pendamping sesuai perjanjian Pemerintah dengan negara donor.

2. Hal-hal yang diperhatikan :
   a. Pembangunan hanya untuk gedung pelayanan (seperti gedung poliklinik/rawat jalan, gedung rawat inap, gedung UGD, kamar operasi (OK), gedung radiologi, gedung ICU, dan lain-lain).
   b. Pengadaan sarana/peralatan hanya untuk peralatan medik yang mendukung 5 (lima) sasaran program Pembinaan Upaya Kesehatan.
   c. Pengadaan peralatan non medik (meubelair, lift, AC, *nurse call*, dan lain-lain) hanya untuk kelengkapan gedung baru.
   d. Biaya operasional pemeliharaan untuk gedung dan peralatan rumah sakit disesuaikan dengan status kepemilikan Rumah Sakit.

e. Dana APBN yang didaerahkan untuk RS tidak diperbolehkan untuk gedung kantor, gedung asrama, rumah dokter, rumah direktur, garasi, *workshop*, aula, masjid, jalan lingkungan/ kompleks, parkir, pagar atau taman.

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN **Rp. 187.504.289.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan di daerah tahun 2011 disediakan dana sebesar Rp.187.504.289.000,- yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 84.320.116.000,- dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 103.184.173.000,-.

Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk seluruh provinsi yang prioritas penggunaannya adalah untuk Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB, Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terutama program-program yang mendukung pencapaian MDG's yaitu Malaria, HIV/AIDS, TB serta penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular. Daerah yang tidak mendapat bantuan PHLN kegiatan penyehatan lingkungan, diberikan alokasi Rupiah Murni untuk mendukung upaya terobosan inovatif dalam rangka pencapaian indikator RPJM/Renstra dan MDG's yang terkait dengan kegiatan penyehatan lingkungan. Daerah yang mendapat PHLN CWSHP ada 4 Provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi dan Bengkulu; PAMSIMAS ada 15 Provinsi yakni Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Banten, Gorontalo, Irian Jaya Barat; serta ICWRMIP ada satu provinsi yaitu Jawa Barat. Juga untuk pengelolaan Satuan Kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang - Wilayah Vertikal (Satuan Kerja Kantor Daerah) program tersebut termasuk penyusunan laporan keuangan.

Sedangkan dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk membantu kabupaten/kota dalam mendanai pelaksanaan program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, di khususkan untuk mendanai kegiatan penyehatan lingkungan melalui PHLN yang terdiri dari CWSHP di 20 kabupaten dan 320 desa, dan ICWRMIP di 3 kabupaten/kota dan 15 desa.

Lingkup kegiatan terdiri atas :

1. Penyediaan sarana air minum berbasis masyarakat;
2. Penyediaan sarana sanitasi komunal untuk sekolah dasar dan Tempat Ibadah/TTU;
3. Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
4. Surveilans Kualitas Air Minum.

V. PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN **Rp. 26.400.000.000-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di daerah tahun 2011 di sediakan dana Dekonsentrasi sebesar Rp 26.400.000.000,-.

Kegiatan yang dibiayai dari dana Dekonsentrasi utamanya untuk:

1. Administrasi kegiatan;
2. Advokasi pelaksanaan SAI program kefarmasian dan alat kesehatan;
3. Pemutakhiran data kefarmasian dan alat kesehatan tingkat provinsi;
4. Advokasi pengelolaan obat terpadu di kabupaten/kota;
5. Integrasi dan harmonisasi obat program dan PKD;
6. Biaya operasional instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota;
7. Pilot project pelayanan kefarmasian di apotek, puskesmas dan rumah sakit;
8. Monitoring dan evaluasi indikator POR dan penggunaan obat generik;
9. Sosialisasi *good pharmacy practice* (GPP);
10. Sampling alat kesehatan dan PKRT;
11. Monitoring dan evaluasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan dan PKRT, serta
12. Pengelolaan satuan kerja (unit akuntansi kuasa pengguna anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi program kefarmasian termasuk penyusunan laporan keuangan.

Di samping itu, terdapat menu tambahan yang dapat dipilih apabila kegiatan pada menu wajib telah terakomodir atau telah tersedia anggaran pada APBD, antara lain:

1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai pelaksanaannya;
2. Monitoring ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota;
3. Bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan DAK program farmasi dan alat kesehatan;
4. Peningkatan kapasitas SDM tentang manajemen logistik obat di puskesmas;
5. Peningkatan kapasitas SDM tentang manajemen logistik obat bencana;
6. Sosialisasi *software* ketersediaan obat di provinsi/kabupaten/kota;
7. Pemberdayaan masyarakat tentang penggunaan obat rasional bagi tenaga kesehatan;
8. Pembekalan teknis klinik penggunaan obat rasional;
9. Pelatihan *software* penggunaan obat rasional;
10. Pembekalan tenaga kefarmasian tentang *Pharmaceutical care* di komunitas dan rumah sakit;
11. Pengawasan peredaran produk alat kesehatan dan PKRT di lapangan;
12. Sosialisasi *software* dinamika obat di PBF dan *software* narkotika dan psikotropika (SIPNAP)

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK) **Rp. 86.702.400.000,-**

Untuk mendukung penyelenggaraan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan di daerah pada tahun 2011 disediakan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 86.702.400.000,-.

Dana dekonsentrasi tersebut digunakan untuk membiayai Kegiatan Kebijakan dan Manajemen PPSDM Kesehatan dengan output :

1. Layanan perkantoran
2. Buku profil kesehatan SDM kesehatan
3. SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan
4. Laporan MTKP

5. Aparatur mengikuti pelatihan
6. Laporan keuangan satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang) dinas kesehatan provinsi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK); dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang - Wilayah Vertikal (Satuan Kerja Kantor Daerah) program tersebut.

Tujuan kegiatan tersebut di atas adalah untuk:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan program dalam menunjang komitmen global (*Millenium Development Goals*/MDG's), prioritas nasional dan program spesifik daerah,
2. Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM Kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan provinsi/ kabupaten/kota,
3. Terselenggaranya tugas belajar bagi PNS daerah,
4. Terlatihnya diklat teknis fungsional dan manajemen kesehatan.

MENTERI KESEHATAN ,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731/MENKES/SK/IV/2011

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI UNTUK MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2011

I PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	2.072.217			2.072.217
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	5.365.860			5.365.860
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	6.914.805			6.914.805
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	2.987.587			2.987.587
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	7.084.930			7.084.930
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	4.819.513			4.819.513
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	4.926.392			4.926.392
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	3.927.702			3.927.702
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	3.192.137			3.192.137
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	3.333.814			3.333.814
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	3.580.032			3.580.032
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	3.914.678			3.914.678
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	3.522.888			3.522.888
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	2.986.805			2.986.805
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	3.829.006			3.829.006
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	3.457.828			3.457.828
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	3.904.340			3.904.340
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	4.855.655			4.855.655
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	5.481.046			5.481.046
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	3.119.670			3.119.670
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	3.475.162			3.475.162
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	3.290.723			3.290.723
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.243.474			3.243.474
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.195.345			4.195.345
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	5.480.716			5.480.716
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	2.703.370			2.703.370
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	4.091.383			4.091.383
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	2.475.714			2.475.714
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	2.610.341			2.610.341
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	2.595.553			2.595.553
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2.992.109			2.992.109
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	2.628.593			2.628.593
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	2.353.112			2.353.112
JUMLAH:		**125.412.500**	**-**	**-**	**125.412.500**

II PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	2.362.291			2.362.291
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	6.097.447			6.097.447
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	6.614.109			6.614.109
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	2.481.707			2.481.707
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	7.220.246			7.220.246
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	4.253.008			4.253.008
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	4.938.069	7.700.000	26.550.000	39.188.069
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	4.343.009	337.562	1.543.379	6.223.950
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	3.117.048			3.117.048
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	2.830.707			2.830.707
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	3.612.045	10.865.246	39.822.345	54.299.636
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	3.531.821			3.531.821
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	3.452.901	6.500.000	17.850.000	27.802.901
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	3.410.695	1.243.375	1.958.947	6.613.017
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	3.506.503	1.688.008	2.788.689	7.983.200
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	3.529.222	-		3.529.222
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	3.503.005			3.503.005
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	3.204.980			3.204.980
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	4.489.515	8.304.715	18.501.371	31.295.601
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	3.150.450			3.150.450
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	3.044.109			3.044.109
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	3.194.525			3.194.525
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.876.286	7.502.339	15.284.544	25.663.169
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.872.818	7.901.980	22.762.018	34.536.816
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	5.573.522			5.573.522
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	2.903.527			2.903.527
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	2.965.858			2.965.858
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	3.401.225			3.401.225
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	2.304.738	592.749	1.076.384	3.973.871
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	2.478.929	1.038.689	1.501.008	5.018.626
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2.738.341			2.738.341
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	3.487.263			3.487.263
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	2.798.232	928.730	1.984.456	5.711.418
JUMLAH:		**121.288.151**	**54.603.393**	**151.623.141**	**327.514.685**

III PROGRAM BINA UPAYA KESEHATAN

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	133.541			133.541
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	721.923			721.923
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	860.706			860.706
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	260.661			260.661
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	931.190			931.190
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	782.121			782.121
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	958.356			958.356
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	717.818			717.818
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	613.586			613.586
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	590.054			590.054
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	656.653			656.653
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	579.281			579.281
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	662.392			662.392
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	329.792			329.792
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	639.301			639.301
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	788.841			788.841
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	664.966			664.966
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	563.259			563.259
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	870.799			870.799
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	506.324			506.324
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	613.637			613.637
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	359.719			359.719
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	545.985			545.985
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	719.883			719.883
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	1.324.175			1.324.175
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	516.462			516.462
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	511.894			511.894
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	428.579			428.579
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	194.246			194.246
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	355.888			355.888
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	455.075			455.075
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	635.721			635.721
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	307.172			307.172
JUMLAH		**19.800.000**	**-**	**-**	**19.800.000**

IV PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	1.322.520			1.322.520
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1.343.690	920.923	1.247.974	3.512.587
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1.500.800	4.124.420	6.200.840	11.826.060
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	1.280.710			1.280.710
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	2.249.430			2.249.430
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	1.861.930			1.861.930
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	2.064.390			2.064.390
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	1.074.160	2.230.260	2.458.040	5.762.460
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	831.850	1.231.860	1.123.660	3.187.370
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	754.320	448.979	709.382	1.912.681
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	952.080	1.344.890	1.495.080	3.792.050
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	1.535.150			1.535.150
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	877.420	489.633	922.828	2.289.881
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	877.390	473.348	837.350	2.188.088
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	889.940	1.346.440	1.556.360	3.792.740
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	1.618.430			1.618.430
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	1.650.070			1.650.070
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	784.100	1.434.360	1.398.280	3.616.740
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1.185.490	1.139.690	1.327.810	3.652.990
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	1.550.550			1.550.550
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	879.340	277.070	294.650	1.451.060
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	1.538.530			1.538.530
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.422.490			1.422.490
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.166.980	1.750.660	1.946.280	4.863.920
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	2.385.850			2.385.850
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	777.990	409.579	523.240	1.710.809
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	789.430	241.620	192.350	1.223.400
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	651.990	364.140	426.360	1.442.490
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1.297.220			1.297.220
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	627.400	496.860	608.910	1.733.170
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	1.316.020			1.316.020
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	1.041.010	255.020	314.150	1.610.180
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	561.910	491.740	604.500	1.658.150
JUMLAH:		**40.660.580**	**19.471.492**	**24.188.044**	**84.320.116**

V PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	346.880			346.880
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	1.019.533			1.019.533
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	1.216.947			1.216.947
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	531.601			531.601
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	1.411.265			1.411.265
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	688.902			688.902
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	1.151.616			1.151.616
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	839.471			839.471
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	496.493			496.493
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	651.324			651.324
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	789.354			789.354
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	922.812			922.812
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	977.427			977.427
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	755.620			755.620
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	733.808			733.808
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	503.468			503.468
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	799.141			799.141
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	920.519			920.519
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	1.180.874			1.180.874
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	935.888			935.888
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	918.100			918.100
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	594.401			594.401
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	881.328			881.328
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.126.834			1.126.834
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	878.652			878.652
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	660.674			660.674
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	860.615			860.615
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	755.645			755.645
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	402.967			402.967
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	781.967			781.967
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	416.269			416.269
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	491.669			491.669
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	757.936			757.936
JUMLAH:		**26.400.000**	-	-	**26.400.000**

VI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
01	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	1.698.850			1.698.850
02	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	3.428.310			3.428.310
03	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	3.417.250			3.417.250
04	Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta	2.004.805			2.004.805
05	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	3.954.860			3.954.860
06	Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	3.672.590			3.672.590
07	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara	3.523.880			3.523.880
08	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	2.684.895			2.684.895
09	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	2.531.100			2.531.100
10	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	2.377.215			2.377.215
11	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	2.766.865			2.766.865
12	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	2.602.480			2.602.480
13	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	2.720.740			2.720.740
14	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	2.519.700			2.519.700
15	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	2.398.050			2.398.050
16	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur	2.680.920			2.680.920
17	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara	3.001.640			3.001.640
18	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah	2.306.350			2.306.350
19	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	3.144.240			3.144.240
20	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara	2.341.620			2.341.620
21	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku	2.672.953			2.672.953
22	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	2.401.470			2.401.470
23	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.584.304			2.584.304
24	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.826.208			2.826.208
25	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	3.874.370			3.874.370
26	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	2.583.060			2.583.060
27	Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara	1.986.575			1.986.575
28	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	1.914.660			1.914.660
29	Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung	1.912.130			1.912.130
30	Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo	2.060.160			2.060.160
31	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	2.260.990			2.260.990
32	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat	2.204.980			2.204.980
33	Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat	1.644.180			1.644.180
JUMLAH:		**86.702.400**	-	-	**86.702.400**

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 731/MENKES/SK/IV/2011

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2011

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
- 26 -

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN UNTUK MASING-MASING PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2011

I PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	-	602.810	5.425.290	6.028.100
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	-	627.282	5.645.542	6.272.824
3	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	-	601.865	5.416.785	6.018.650
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari	-	1.229.008	2.506.832	3.735.840
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	-	1.367.692	2.814.348	4.182.040
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Bungo	-	1.229.008	2.506.832	3.735.840
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun	-	1.228.628	2.506.012	3.734.640
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi	-	1.091.084	2.200.956	3.292.040
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	-	1.229.768	2.508.472	3.738.240
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau	-	952.020	1.892.620	2.844.640
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	-	1.227.868	2.504.372	3.732.240
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	-	1.229.188	2.507.652	3.736.840
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	-	1.228.628	2.506.012	3.734.640
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	-	1.506.376	3.121.864	4.628.240
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	-	2.347.460	4.961.220	7.308.680
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	-	1.227.868	2.504.372	3.732.240
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	-	110.176	51.624	161.800
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	-	1.229.008	2.506.832	3.735.840
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau	-	1.227.488	2.503.552	3.731.040
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur	-	1.229.188	2.507.652	3.736.840
21	Dinas Kesehatan Kota Ambon	2.000.000	-	-	2.000.000
22	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara	-	1.227.868	2.504.372	3.732.240
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan	-	1.229.188	2.507.652	3.736.840
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong	-	1.226.728	2.501.912	3.728.640
25	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	8.165.199			8.165.199
JUMLAH:		**10.165.199**	**26.406.197**	**66.612.777**	**103.184.173**

II PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	**PROVINSI ACEH**				-
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat	975.000			975.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar	1.875.000			1.875.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan	1.575.000			1.575.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	750.000			750.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah	1.050.000			1.050.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara	1.275.000			1.275.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur	1.725.000			1.725.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	2.100.000			2.100.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	1.275.000			1.275.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie	1.950.000			1.950.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten simeuleu	600.000			600.000
12	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	825.000			825.000
13	Dinas Kesehatan Kota Sabang	455.000			455.000
14	Dinas Kesehatan Kota Langsa	387.500			387.500
15	Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe	455.000			455.000
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues	900.000			900.000
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya	975.000			975.000
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya	600.000			600.000
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya	975.000			975.000
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang	1.050.000			1.050.000
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah	750.000			750.000
22	Dinas Kesehatan Kota Subulussalam	387.500			387.500
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Jaya	675.000			675.000
	JUMLAH:	**23.585.000**	-	-	**23.585.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
II	**SUMATERA UTARA**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan	1.350.000			1.350.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi	1.350.000			1.350.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang	2.475.000			2.475.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Karo	1.425.000			1.425.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu	900.000			900.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat	2.250.000			2.250.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal	1.950.000			1.950.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias	600.000			600.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun	2.475.000			2.475.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan	1.125.000			1.125.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah	1.425.000			1.425.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara	1.200.000			1.200.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Toba Samosir	1.350.000			1.350.000
14	Dinas Kesehatan Kota Binjai	600.000			600.000
15	Dinas Kesehatan Kota Medan	2.925.000			2.925.000
16	Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar	1.275.000			1.275.000
17	Dinas Kesehatan Kota Sibolga	320.000			320.000
18	Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai	600.000			600.000
19	Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi	675.000			675.000
20	Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan	675.000			675.000
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Barat	600.000			600.000
22	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan	1.575.000			1.575.000
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan	825.000			825.000
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1.500.000			1.500.000
25	Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	825.000			825.000
26	Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara	675.000			675.000
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas	900.000			900.000
28	Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara	975.000			975.000
29	Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	600.000			600.000
30	Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.200.000			1.200.000
31	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara	825.000			825.000
32	Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat	320.000			320.000
33	Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli	252.500			252.500
	JUMLAH:	**38.017.500**	-	-	**38.017.500**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
III	**SUMATERA BARAT**				
1	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	-	-	128.117.969	128.117.969
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota	1.650.000			1.650.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Agam	1.650.000			1.650.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai	525.000			525.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman	1.800.000			1.800.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman	1.200.000			1.200.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	1.350.000			1.350.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	900.000			900.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok	1.350.000			1.350.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar	1.650.000			1.650.000
11	Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi	455.000			455.000
12	Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang	252.500			252.500
13	Dinas Kesehatan Kota Padang	1.500.000			1.500.000
14	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	600.000			600.000
15	Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto	455.000			455.000
16	Dinas Kesehatan Kota Solok	320.000			320.000
17	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	455.000			455.000
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat	1.200.000			1.200.000
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	750.000			750.000
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan	455.000			455.000
	JUMLAH:	**18.517.500**	**-**	**128.117.969**	**146.635.469**
IV	**RIAU**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	825.000			825.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir	1.725.000			1.725.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu	1.275.000			1.275.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	1.425.000			1.425.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi	1.275.000			1.275.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan	900.000			900.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	1.200.000			1.200.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu	1.575.000			1.575.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Siak	1.050.000			1.050.000
10	Dinas Kesehatan Kota Dumai	675.000			675.000
11	Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	1.425.000			1.425.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti	600.000			600.000
	JUMLAH:	**13.950.000**	**-**	**-**	**13.950.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
V	**JAMBI**					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Batanghari	1.200.000			1.200.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bungo	1.350.000			1.350.000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kerinci	1.350.000			1.350.000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Merangin	1.350.000			1.350.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Muaro Jambi	1.350.000			1.350.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sarolangun	900.000			900.000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	900.000			900.000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1.275.000			1.275.000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tebo	1.050.000			1.050.000
10	Dinas Kesehatan	Kota Jambi	1.500.000			1.500.000
11	Dinas Kesehatan	Kota Sungai Penuh	455.000			455.000
		JUMLAH:	**12.680.000**	-	-	**12.680.000**
VI	**SUMATERA SELATAN**					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lahat	1.875.000			1.875.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Musi Banyuasin	1.875.000			1.875.000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Musi Rawas	2.025.000			2.025.000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Muara Enim	1.650.000			1.650.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1.800.000			1.800.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1.050.000			1.050.000
7	Dinas Kesehatan	Kota Palembang	2.775.000			2.775.000
8	Dinas Kesehatan	Kota Prabumulih	525.000			525.000
9	Dinas Kesehatan	Kota Pagar Alam	455.000			455.000
10	Dinas Kesehatan	Kota Lubuk Linggau	600.000			600.000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banyuasin	2.175.000			2.175.000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Ilir	1.800.000			1.800.000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1.500.000			1.500.000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1.125.000			1.125.000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Empat Lawang	600.000			600.000
		JUMLAH:	**21.830.000**	-	-	**21.830.000**
VII	**BENGKULU**					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	1.050.000			1.050.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkulu Utara	1.425.000			1.425.000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rejang Lebong	1.575.000			1.575.000
4	Dinas Kesehatan	Kota Bengkulu	1.425.000			1.425.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kaur	1.200.000			1.200.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Seluma	1.575.000			1.575.000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mukomuko	1.200.000			1.200.000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lebong	825.000			825.000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepahiang	1.050.000			1.050.000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bengkulu Tengah	1.425.000			1.425.000
		JUMLAH:	**12.750.000**	-	-	**12.750.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
VIII	**LAMPUNG**					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Barat	1.350.000			1.350.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Selatan	1.800.000			1.800.000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Tengah	2.775.000			2.775.000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Utara	1.875.000			1.875.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lampung Timur	2.325.000			2.325.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tanggamus	1.650.000			1.650.000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tulang Bawang	1.050.000			1.050.000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Way Kanan	1.350.000			1.350.000
9	Dinas Kesehatan	Kota Bandar Lampung	2.025.000			2.025.000
10	Dinas Kesehatan	Kota Metro	750.000			750.000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pesawaran	900.000			900.000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pringsewu	750.000			750.000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Mesuji	600.000			600.000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tulang Bawang Barat	675.000			675.000
		JUMLAH:	**19.875.000**	-	-	**19.875.000**
IX	**KEPULAUAN RIAU**					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Natuna	900.000			900.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karimun	675.000			675.000
3	Dinas Kesehatan	Kota Batam	975.000			975.000
4	Dinas Kesehatan	Kota Tanjung Pinang	455.000			455.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Lingga	525.000			525.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bintan	900.000			900.000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kepulauan Anambas	525.000			525.000
		JUMLAH:	**4.955.000**	-	-	**4.955.000**
X	**BANGKA BELITUNG**					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka	825.000			825.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Blitung	675.000			675.000
3	Dinas Kesehatan	Kota Pangkal Pinang	675.000			675.000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka Selatan	600.000			600.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka Tengah	525.000			525.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bangka Barat	600.000			600.000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Belitung Timur	455.000			455.000
		JUMLAH:	**4.355.000**	-	-	**4.355.000**
XI	**DKI JAKARTA**					
1	Dinas Kesehatan	Provinsi DKI Jakarta	25.575.000			25.575.000
		JUMLAH:	**25.575.000**	-	-	**25.575.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XII	**JAWA BARAT**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung	4.725.000			4.725.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi	2.550.000			2.550.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor	7.575.000			7.575.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	3.825.000			3.825.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur	3.375.000			3.375.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	4.200.000			4.200.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Garut	4.350.000			4.350.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu	3.675.000			3.675.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang	3.600.000			3.600.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan	2.775.000			2.775.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka	2.325.000			2.325.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	1.500.000			1.500.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Subang	3.000.000			3.000.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi	4.350.000			4.350.000
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang	2.400.000			2.400.000
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya	3.000.000			3.000.000
17	Dinas Kesehatan Kota Bandung	5.325.000			5.325.000
18	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	2.325.000			2.325.000
19	Dinas Kesehatan Kota Bogor	1.800.000			1.800.000
20	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	1.575.000			1.575.000
21	Dinas Kesehatan Kota Depok	2.400.000			2.400.000
22	Dinas Kesehatan Kota Sukabumi	1.125.000			1.125.000
23	Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya	1.350.000			1.350.000
24	Dinas Kesehatan Kota Cimahi	675.000			675.000
25	Dinas Kesehatan Kota Banjar	750.000			750.000
26	Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat	2.325.000			2.325.000
	JUMLAH:	**76.875.000**	-	-	**76.875.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XIII	JAWA TENGAH					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banjarnegara	2.625.000			2.625.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Banyumas	2.925.000			2.925.000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Batang	1.575.000			1.575.000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Blora	1.950.000			1.950.000
5	Dinas Kesehatan	Kabupaten Boyolali	2.175.000			2.175.000
6	Dinas Kesehatan	Kabupaten Brebes	2.100.000			2.100.000
7	Dinas Kesehatan	Kabupaten Cilacap	2.700.000			2.700.000
8	Dinas Kesehatan	Kabupaten Demak	1.950.000			1.950.000
9	Dinas Kesehatan	Kabupaten Grobogan	2.250.000			2.250.000
10	Dinas Kesehatan	Kabupaten Jepara	1.575.000			1.575.000
11	Dinas Kesehatan	Kabupaten Karanganyar	1.575.000			1.575.000
12	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kebumen	2.550.000			2.550.000
13	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kendal	2.250.000			2.250.000
14	Dinas Kesehatan	Kabupaten Klaten	2.550.000			2.550.000
15	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kudus	1.425.000			1.425.000
16	Dinas Kesehatan	Kabupaten Magelang	2.175.000			2.175.000
17	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pati	2.175.000			2.175.000
18	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pekalongan	1.950.000			1.950.000
19	Dinas Kesehatan	Kabupaten Pemalang	1.650.000			1.650.000
20	Dinas Kesehatan	Kabupaten Purbalingga	1.650.000			1.650.000
21	Dinas Kesehatan	Kabupaten Purworejo	2.025.000			2.025.000
22	Dinas Kesehatan	Kabupaten Rembang	1.200.000			1.200.000
23	Dinas Kesehatan	Kabupaten Semarang	1.950.000			1.950.000
24	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sragen	1.950.000			1.950.000
25	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sukoharjo	900.000			900.000
26	Dinas Kesehatan	Kabupaten Tegal	2.100.000			2.100.000
27	Dinas Kesehatan	Kabupaten Temanggung	1.725.000			1.725.000
28	Dinas Kesehatan	Kabupaten Wonogiri	2.550.000			2.550.000
29	Dinas Kesehatan	Kabupaten wonosobo	1.725.000			1.725.000
30	Dinas Kesehatan	Kota Magelang	387.500			387.500
31	Dinas Kesehatan	Kota Pekalongan	900.000			900.000
32	Dinas Kesehatan	Kota Salatiga	455.000			455.000
33	Dinas Kesehatan	Kota Semarang	2.700.000			2.700.000
34	Dinas Kesehatan	Kota Surakarta	1.275.000			1.275.000
35	Dinas Kesehatan	Kota Tegal	600.000			600.000
		JUMLAH:	**64.217.500**	-	-	**64.217.500**
XIV	DI YOGYAKARTA					
1	Dinas Kesehatan	Kabupaten Bantul	2.025.000			2.025.000
2	Dinas Kesehatan	Kabupaten Gunung Kidul	2.250.000			2.250.000
3	Dinas Kesehatan	Kabupaten Kulon Progo	1.575.000			1.575.000
4	Dinas Kesehatan	Kabupaten Sleman	1.875.000			1.875.000
5	Dinas Kesehatan	Kota Yogyakarta	1.350.000			1.350.000
		JUMLAH:	**9.075.000**	-	-	**9.075.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XV	JAWA TIMUR				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan	1.650.000			1.650.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	3.375.000			3.375.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar	1.800.000			1.800.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro	2.700.000		-	2.700.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso	1.875.000			1.875.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	2.400.000			2.400.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Jember	3.675.000			3.675.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang	2.550.000			2.550.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri	2.775.000			2.775.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	2.400.000			2.400.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang	1.875.000			1.875.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun	1.875.000			1.875.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	1.650.000			1.650.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	2.925.000			2.925.000
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto	2.025.000			2.025.000
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	1.500.000			1.500.000
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	1.800.000			1.800.000
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	1.800.000			1.800.000
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan	1.500.000			1.500.000
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan	2.475.000			2.475.000
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	2.325.000			2.325.000
22	Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo	2.475.000			2.475.000
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang	1.500.000			1.500.000
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo	1.950.000			1.950.000
25	Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo	1.275.000			1.275.000
26	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep	2.175.000			2.175.000
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek	1.650.000			1.650.000
28	Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban	2.475.000			2.475.000
29	Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung	2.325.000			2.325.000
30	Dinas Kesehatan Kota Blitar	252.500			252.500
31	Dinas Kesehatan Kota Kediri	675.000			675.000
32	Dinas Kesehatan Kota Madiun	455.000			455.000
33	Dinas Kesehatan Kota malang	1.125.000			1.125.000
34	Dinas Kesehatan Kota Mojokerto	387.500			387.500
35	Dinas Kesehatan Kota Pasuruan	525.000			525.000
36	Dinas Kesehatan Kota Probolinggo	455.000			455.000
37	Dinas Kesehatan Kota Surabaya	3.975.000			3.975.000
38	Dinas Kesehatan Kota Batu	387.500			387.500
	JUMLAH:	71.012.500	-	-	71.012.500

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XVI	**BANTEN**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak	3.000.000			3.000.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang	2.700.000			2.700.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Serang	2.100.000			2.100.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang	3.150.000			3.150.000
5	Dinas Kesehatan Kota Cilegon	600.000			600.000
6	Dinas Kesehatan Kota Tangerang	1.875.000			1.875.000
7	Dinas Kesehatan kota Serang	750.000			750.000
8	Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan	1.875.000			1.875.000
	JUMLAH:	**16.050.000**	-	-	**16.050.000**
XVI	**BALI**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Badung	900.000			900.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli	825.000			825.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng	1.500.000			1.500.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar	975.000			975.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Jembarana	455.000			455.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem	900.000			900.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung	675.000			675.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan	1.500.000			1.500.000
9	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	825.000			825.000
	JUMLAH:	**8.555.000**	-	-	**8.555.000**
XVII	**NUSA TENGGARA BARAT**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	5.000.000			5.000.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu	2.250.000			2.250.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat	3.750.000			3.750.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah	6.250.000			6.250.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur	7.250.000			7.250.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa	6.000.000			6.000.000
7	Dinas Kesehatan Kota Mataram	2.250.000			2.250.000
8	Dinas Kesehatan Kota Bima	1.250.000			1.250.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	2.000.000			2.000.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara	1.250.000			1.250.000
	JUMLAH:	**37.250.000**	-	-	**37.250.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XIX	**NUSA TENGGARA TIMUR**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Alor	5.250.000			5.250.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Belu	5.750.000			5.750.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Ende	5.500.000			5.500.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur	4.500.000			4.500.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang	5.750.000			5.750.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata	2.250.000			2.250.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai	3.750.000			3.750.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada	2.500.000			2.500.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka	5.750.000			5.750.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat	1.250.000			1.250.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur	4.250.000			4.250.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan	6.500.000			6.500.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara	6.500.000			6.500.000
14	Dinas Kesehatan Kota Kupang	2.500.000			2.500.000
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	3.000.000			3.000.000
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat	3.000.000			3.000.000
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Nagakeo	1.500.000			1.500.000
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya	1.750.000			1.750.000
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah	1.500.000			1.500.000
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur	3.000.000			3.000.000
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua	1.500.000			1.500.000
	JUMLAH:	**77.250.000**	-	-	**77.250.000**
XX	**KALIMANTAN BARAT**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayak	1.700.000			1.700.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	1.600.000			1.600.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu	2.300.000			2.300.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang	2.400.000			2.400.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak	1.400.000			1.400.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas	2.500.000			2.500.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau	1.800.000			1.800.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang	2.000.000			2.000.000
9	Dinas Kesehatan Kota Pontianak	2.300.000			2.300.000
10	Dinas Kesehatan Kota Singkawang	500.000			500.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau	1.100.000			1.100.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi	1.100.000			1.100.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara	600.000			600.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	1.800.000			1.800.000
	JUMLAH:	**23.100.000**	-	-	**23.100.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XXI	KALIMANTAN TENGAH				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	1.000.000			1.000.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara	1.400.000			1.400.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas	2.300.000			2.300.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	1.500.000			1.500.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	1.900.000			1.900.000
6	Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya	900.000			900.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	1.500.000			1.500.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan	1.100.000			1.100.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara	500.000			500.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten lamandau	1.000.000			1.000.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas	1.300.000			1.300.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau	1.100.000			1.100.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya	800.000			800.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur	1.100.000			1.100.000
	JUMLAH:	**17.400.000**	-	-	**17.400.000**
XXI	KALIMANTAN SELATAN				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar	2.300.000			2.300.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	1.700.000			1.700.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1.900.000			1.900.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1.900.000			1.900.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	1.200.000			1.200.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru	2.500.000			2.500.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	1.500.000			1.500.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	1.700.000			1.700.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin	1.300.000			1.300.000
10	Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru	700.000			700.000
11	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	2.600.000			2.600.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan	1.000.000			1.000.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	1.100.000			1.100.000
	JUMLAH:	**21.400.000**	-	-	**21.400.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XXIII	**KALIMANTAN TIMUR**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Berau	1.700.000			1.700.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan	1.200.000			1.200.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai	3.000.000			3.000.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat	2.300.000			2.300.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur	1.900.000			1.900.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau	1.300.000			1.300.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan	1.200.000			1.200.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir	1.700.000			1.700.000
9	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	2.600.000			2.600.000
10	Dinas Kesehatan Kota Bontang	410.000			410.000
11	Dinas Kesehatan Kota Samarinda	2.300.000			2.300.000
12	Dinas Kesehatan Kota Tarakan	700.000			700.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara	1.100.000			1.100.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	320.000			320.000
JUMLAH:		**21.730.000**	-	-	**21.730.000**
XXIV	**SULAWESI UTARA**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	1.400.000			1.400.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa	1.900.000			1.900.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	1.600.000			1.600.000
4	Dinas Kesehatan Kota Bitung	900.000			900.000
5	Dinas Kesehatan Kota Manado	1.500.000			1.500.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Talaud	1.900.000			1.900.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan	1.700.000			1.700.000
8	Dinas Kesehatan Kota Tomohon	700.000			700.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Utara	1.000.000			1.000.000
10	Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu	500.000			500.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	800.000			800.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepaulauan Siau Tagulandang Biaro	1.000.000			1.000.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara	1.100.000			1.100.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	500.000			500.000
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	500.000			500.000
JUMLAH:		**17.000.000**	-	-	**17.000.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XXV	**SULAWESI TENGAH**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai	2.000.000			2.000.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan	1.500.000			1.500.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Buol	1.000.000			1.000.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli	1.400.000			1.400.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala	1.500.000			1.500.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali	1.500.000			1.500.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Poso	1.900.000			1.900.000
8	Dinas Kesehatan Kota Palu	1.200.000			1.200.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong	1.900.000			1.900.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una Una	1.200.000			1.200.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi	900.000			900.000
	JUMLAH:	**16.000.000**	-	-	**16.000.000**
XXVI	**SULAWESI SELATAN**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng	1.200.000			1.200.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Barru	1.000.000			1.000.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	3.600.000			3.600.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba	1.600.000			1.600.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang	1.300.000			1.300.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	2.300.000			2.300.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto	1.700.000			1.700.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu	2.100.000			2.100.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara	1.200.000			1.200.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Maros	1.400.000			1.400.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	1.900.000			1.900.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang	1.500.000			1.500.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	1.300.000			1.300.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang	1.400.000			1.400.000
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai	1.500.000			1.500.000
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng	1.700.000			1.700.000
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar	1.400.000			1.400.000
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja	2.000.000			2.000.000
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo	2.200.000			2.200.000
20	Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare	600.000			600.000
21	Dinas Kesehatan Kota Makassar	3.700.000			3.700.000
22	Dinas Kesehatan Kota Palopo	900.000			900.000
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur	1.500.000			1.500.000
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara	2.200.000			2.200.000
	JUMLAH:	**41.200.000**	-	-	**41.200.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XXVII	SULAWESI TENGGARA				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Buton	2.900.000			2.900.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe	2.500.000			2.500.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka	2.100.000			2.100.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Muna	2.800.000			2.800.000
5	Dinas Kesehatan Kota Kendari	1.400.000			1.400.000
6	Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau	1.300.000			1.300.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan	2.200.000			2.200.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana	2.200.000			2.200.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi	1.900.000			1.900.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara	1.600.000			1.600.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara	1.200.000			1.200.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara	600.000			600.000
	JUMLAH:	**22.700.000**	-	-	**22.700.000**
XXVIII	GORONTALO				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo	1.000.000			1.000.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo	2.000.000			2.000.000
3	Dinas Kesehatan Kota Gorontalo	700.000			700.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato	1.000.000			1.000.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango	1.900.000			1.900.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara	1.000.000			1.000.000
	JUMLAH:	**7.600.000**	-	-	**7.600.000**
XXIX	SULAWESI BARAT				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Majene	800.000			800.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten mamuju	2.700.000			2.700.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar	2.000.000			2.000.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten mamasa	1.500.000			1.500.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara	1.100.000			1.100.000
	JUMLAH:	**8.100.000**	-	-	**8.100.000**
XXX	MALUKU				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2.200.000			2.200.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah	6.200.000			6.200.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara	2.800.000			2.800.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Buru	1.800.000			1.800.000
5	Dinas Kesehatan Kota Ambon	4.400.000			4.400.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat	2.800.000			2.800.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur	2.800.000			2.800.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru	4.200.000			4.200.000
9	Dinas Kesehatan Kota Tual	1.000.000			1.000.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya	2.400.000			2.400.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan	600.000			600.000
	JUMLAH:	**31.200.000**	-	-	**31.200.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XXXI	**MALUKU UTARA**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah	1.400.000			1.400.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	2.000.000			2.000.000
3	Dinas Kesehatan Kota Ternate	1.600.000			1.600.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur	2.200.000			2.200.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan	6.000.000			6.000.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara	2.800.000			2.800.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula	1.800.000			1.800.000
8	Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan	1.200.000			1.200.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai	1.000.000			1.000.000
JUMLAH:		**20.000.000**	-	-	**20.000.000**
XXXII	**PAPUA**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor	4.250.000			4.250.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	4.250.000			4.250.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya	3.000.000			3.000.000
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke	4.250.000			4.250.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	3.250.000			3.250.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire	5.000.000			5.000.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai	2.250.000			2.250.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya	2.000.000			2.000.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo	3.500.000			3.500.000
10	Dinas Kesehatan Kota Jayapura	3.000.000			3.000.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya	1.250.000			1.250.000
12	Dinas Kesehatan Kabupaten Tolikara	3.750.000			3.750.000
13	Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom	2.000.000			2.000.000
14	Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang	2.750.000			2.750.000
15	Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digoel	4.000.000			4.000.000
16	Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi	2.750.000			2.750.000
17	Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat	2.250.000			2.250.000
18	Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen	1.500.000			1.500.000
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Sarmi	1.500.000			1.500.000
20	Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori	1.250.000			1.250.000
21	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen	2.250.000			2.250.000
22	Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Tengah	1.000.000			1.000.000
23	Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo	1.250.000			1.250.000
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya	2.500.000			2.500.000
25	Dinas Kesehatan Kabupaten Nduga	2.000.000			2.000.000
26	Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak	2.000.000			2.000.000
27	Dinas Kesehatan Kabupaten Dogiyai	2.000.000			2.000.000
28	Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	1.500.000			1.500.000
29	Dinas Kesehatan Kabupaten Deiyai	2.000.000			2.000.000
JUMLAH:		**74.250.000**	-	-	**74.250.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA	RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
XXXIII	**PAPUA BARAT**				
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong	3.000.000			3.000.000
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari	4.750.000			4.750.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak	2.250.000			2.250.000
4	Dinas Kesehatan Kota Sorong	1.250.000			1.250.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat	3.250.000			3.250.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan	2.000.000			2.000.000
7	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni	3.750.000			3.750.000
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama	1.500.000			1.500.000
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana	2.000.000			2.000.000
10	Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat	1.500.000			1.500.000
11	Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw	1.250.000			1.250.000
JUMLAH:		**26.500.000**	**-**	**-**	**26.500.000**
JUMLAH I S/D XXXIII (SELURUH INDONESIA)		**904.555.000**	**-**	**128.117.969**	**1.032.672.969**

III PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
I	**PROVINSI ACEH**					-
1	Kab. Aceh Tengah	RSUD Datu Beru Takengon	35.000.000			35.000.000
2	Kab. Aceh Tenggara	RSUD H. Sahudin Kutacane	40.000.000			40.000.000
3	Kab. Aceh Barat	RSUD Kab Aceh Barat (Cut Nyak Dhien)	3.500.000			3.500.000
	JUMLAH:		**78.500.000**	-	-	**78.500.000**
II	**SUMATERA UTARA**					
1	Kota Tebing Tinggi	Peningkatan Sarana DINKES	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Deli Serdang	RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam	9.000.000			9.000.000
3	Kota Binjai	RSUD dr. RM. Joelham Binjai	15.000.000			15.000.000
4	Kab. Labuan Batu	RSUD Rantau Prapat	9.000.000			9.000.000
5	Kab. Madina	RSUD Panyabungan	4.500.000			4.500.000
6	Kab. Langkat	RSUD Tanjung Pura Langkat	8.000.000			8.000.000
7	Kab. Samosir	RSUD Hadrianus Sinaga Samosir	4.000.000			4.000.000
8	Kab. Dairi	RSUD Sidikalang	3.500.000			3.500.000
9	Kab. Padang Lawas	RSUD Padang Lawas	5.000.000			5.000.000
10	Kab. Tapanuli Tengah	RSUD Tapanuli Tengah	20.000.000			20.000.000
11	Kab. Asahan	RSUD Kab. Asahan, Sumut	5.000.000			5.000.000
	JUMLAH:		**88.000.000**	-	-	**88.000.000**
III	**SUMATERA BARAT**					
1	Kota Solok	RSUD Kota Solok	15.000.000			15.000.000
2	Kab. Solok	RSUD Arosuka Kab. Solok	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Darmasraya	RSUD Sungai Dareh Dharmasraya	20.000.000			20.000.000
	JUMLAH:		**40.000.000**	-	-	**40.000.000**
IV	**RIAU**					
1	Kab. Indragiri Hulu	RSUD Indragiri Rengat	12.500.000			12.500.000
		Peningkatan Sarana DINKES	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Meranti	RSUD Kab. Meranti	12.000.000			12.000.000
3	Kab. Bengkalis	RSUD DURI	12.000.000			12.000.000
4	Kota Pekanbaru	RSUD Arifin Ahmad	40.000.000			40.000.000
5	Kab. Rokan Hulu	RSUD Rokan Hulu	10.000.000			10.000.000
	JUMLAH:		**91.500.000**	-	-	**91.500.000**
V	**JAMBI**					
1	Kab. Muaro Jambi	RSUD Muaro Jambi	3.000.000			3.000.000
2	Kab. Tanjung Jabung Barat	RSUD KH. Daud Arif	3.000.000			3.000.000
3	Kab. Merangin	RS Kol. Abunjani Bangko	3.000.000			3.000.000
4	Kab. Kerinci	RSUD M. Thalib	17.000.000			17.000.000
	JUMLAH:		**26.000.000**	-	-	**26.000.000**
VI	**SUMATERA SELATAN**					
1	Kab. Lubuk Linggau	RSUD Dr. Siti Aisyah	15.000.000			15.000.000
2	Kab. Oku Timur	RSUD Gumawang	9.000.000			9.000.000
3	Kab. Muara Enim	RSUD HM. Rabain Muara Enim	6.000.000			6.000.000
4	Kab. Ogan Komering Ilir	Dinas Kesehatan Kab. OKI	2.500.000			2.500.000
	JUMLAH:		**32.500.000**	-	-	**32.500.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
VII	BENGKULU					
1	Kab. Lebong	RSUD Lebong	3.500.000			3.500.000
2	Kab. Rejang Lebong	RSUD Curup Rejang Lebong	9.000.000			9.000.000
	JUMLAH:		12.500.000	-	-	12.500.000
VIII	LAMPUNG					
1	Kab.Lampung Selatan	RSUD Kalianda	10.000.000			10.000.000
2	Kota Metro	Peningkatan Sarana DINKES	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Lampung Tengah	RSUD Demang Sepulau Raya	7.000.000			7.000.000
	JUMLAH:		27.000.000	-	-	27.000.000
IX	KEPULAUAN RIAU					
1	Kab. Bintan	RSUD Kab. Bintan	14.500.000			14.500.000
2	Kota Batam	RSUD Batu Aji	20.000.000			20.000.000
	JUMLAH:		34.500.000	-	-	34.500.000
X	BANGKA BELITUNG					
1	Kab. Belitung	Peningkatan Sarana DINKES	18.000.000			18.000.000
2	Kab. Bangka	RSUD Sungailiat	4.000.000			4.000.000
	JUMLAH:		22.000.000	-	-	22.000.000
XI	JAWA BARAT					
1	Prov. Jawa Barat	RSJ Prov. Jawa Barat	60.000.000			60.000.000
2	Kab. Tasikmalaya	Peningkatan Sarana DINKES	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Cianjur	RSUD Cimacan	4.000.000			4.000.000
4	Kab. Bogor	RSUD Ciawi	4.500.000			4.500.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	500.000			500.000
5	Kab. Majalengka	RSUD Cideres	4.000.000			4.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	1.250.000			1.250.000
6	Kab. Bandung Barat	RSUD Bandung Barat	3.000.000			3.000.000
7	Kota Tasikmalaya	RSUD Kota Tasik	3.500.000			3.500.000
8	Kota Banjar	RSUD Kota Banjar	3.500.000			3.500.000
9	Kota Cirebon	LAB KES Kota Cirebon	6.000.000			6.000.000
10	Kab. Bandung	RSUD Soreang	8.000.000			8.000.000
	JUMLAH:		103.250.000	-	-	103.250.000
XII	JAWA TENGAH					
1	Kab. Kebumen	RSUD Kebumen	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Banyumas	RSUD Aji Barang	5.000.000			5.000.000
3	Kota Solo	RSUD Moewardi	5.000.000			5.000.000
		RSUD Kota Solo	4.500.000			4.500.000
4	Kab. Magelang	RSUD Muntilan	4.000.000			4.000.000
5	Kota Semarang	RS Tugurejo	4.500.000			4.500.000
6	Kota Tegal	RSUD Kardinah	3.500.000			3.500.000
7	Kab. Purbalingga	RSUD Purbalingga	3.500.000			3.500.000
8	Kab Tegal	RSUD Suradadi	5.000.000			5.000.000
9	Kab. Semarang	Peningkatan Sarana DINKES	3.000.000			3.000.000
10	Kota Pekalongan	RSUD Kota Pekalongan	25.000.000			25.000.000
	JUMLAH:		73.000.000	-	-	73.000.000

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XIII	**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**					
	Kab. Kulon Progo	RSUD Wates	3.000.000			3.000.000
	JUMLAH:		**3.000.000**	-	-	**3.000.000**
XIV	**JAWA TIMUR**					
1	Kab. Blitar	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	3.500.000			3.500.000
2	Kota Blitar	RSUD Mardi Waluyo	9.000.000			9.000.000
3	Kab. Pamekasan	RSUD Pamekasan	4.500.000			4.500.000
4	Kab. Tulung Agung	RSUD dr. Iskak Tulung Agung	8.500.000			8.500.000
5	Kab. Jember	RSUD Soebandi	3.000.000			3.000.000
		RSUD Balung	3.000.000			3.000.000
6	Kab. Malang	RSUD Kanjuruhan Kepanjen	9.000.000			9.000.000
7	Kab. Nganjuk	RSUD Kertosono	6.000.000			6.000.000
8	Kab. Lumajang	RSUD dr. Haryoto Lumajang	3.500.000			3.500.000
9	Kab. Mojokerto	RSUD Wahidin Sudirohusodo	3.500.000			3.500.000
		RSUD Basoeni	5.000.000			5.000.000
10	Kab. Banyuwangi	RSUD Blambangan	3.500.000			3.500.000
11	Kab. Bondowoso	RSUD Koesnadi	5.000.000			5.000.000
12	Kab. Gresik	RSUD Gresik	25.000.000			25.000.000
13	Prov. Jawa Timur	RSU DR. Soetomo *)	40.000.000			40.000.000
	JUMLAH:		**132.000.000**	-	-	**132.000.000**
XV	**BANTEN**					
1	Prov. Banten	RS Rujukan Provinsi (Baru)	20.000.000			20.000.000
2	Kab. Pandeglang	RSUD Berkah Pandeglang	15.000.000			15.000.000
		RSUD Labuan	5.000.000			5.000.000
3	Kab. Lebak	RSUD Malimping	2.500.000			2.500.000
		RSUD Aji Darmo Lebak	7.500.000			7.500.000
4	Kota Cilegon	RSUD Cilegon	4.000.000			4.000.000
5	Kab. Tangerang	RSUD Tangerang	20.000.000			20.000.000
6	Kota Tangerang Selatan	RSUD A.Sholihin	5.000.000			5.000.000
7	Prov. Banten	Laboratorium Kesehatan Prov. Banten	2.000.000			2.000.000
	JUMLAH:		**81.000.000**	-	-	**81.000.000**
XVI	**BALI**					
1	Kab. Bangli	RSUD Bangli	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Karangasem	RSUD Karangasem	4.000.000			4.000.000
		Peningkatan Sarana Dinkes	7.000.000			7.000.000
3	Kab. Tabanan	RSUD Tabanan	10.000.000			10.000.000
4	Kab. Badung	RSUD Badung	40.000.000			40.000.000
5	Kab. Gianyar	RSUD Kab. Gianyar	14.800.000			14.800.000
	JUMLAH:		**80.800.000**	-	-	**80.800.000**
XVII	**NUSA TENGGARA BARAT**					
1	Kab. Lombok Timur	RSUD Sujono Selong	3.500.000			3.500.000
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	RSUD Prov. NTB	19.400.000			19.400.000
	JUMLAH:		**22.900.000**	-	-	**22.900.000**

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XVIII	NUSA TENGGARA TIMUR					
1	Kab. Belu	RSUD Atambua Belu	4.500.000			4.500.000
2	Kab. Sumba Timur	RSUD Sumba Timur	5.000.000			5.000.000
3	Kota Kupang	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes	10.000.000			10.000.000
4	Kab. Sumba Barat	RSUD Kab. Sumba Barat	5.000.000			5.000.000
5	Kab. Sikka	RSUD Hillers	5.000.000			5.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	1.840.000			1.840.000
6	Kab. Ende	RSUD Ende	2.000.000			2.000.000
	JUMLAH:		33.340.000	-	-	33.340.000
XIX	KALIMANTAN BARAT					
1	Kab. Bengkayang	RSUD Kab. Bengkayang	3.000.000			3.000.000
2	Kota Pontianak	RSUD Pontianak	4.000.000			4.000.000
3	Kab. Sintang	RSUD Ade M. Djoen Sintang	5.000.000			5.000.000
4	Kota Singkawang	RSJ Singkawang	2.000.000			2.000.000
5	Kab. Sambas	RSUD Pemangkat	2.000.000			2.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	1.500.000			1.500.000
6	Prov. Kalimantan Barat	RSUD Sudarso, Kalbar	30.000.000			30.000.000
7	Kab. Landak	RSUD Kab. Landak	25.000.000			25.000.000
	JUMLAH:		72.500.000	-	-	72.500.000
XX	KALIMANTAN TENGAH					
1	Kab. Barito Timur	RSUD Tamiang Layang	2.950.000			2.950.000
2	Kab. Pulang Pisau	RSUD Pulang Pisau	2.950.000			2.950.000
3	Kota Palangkaraya	RSUD Doris Silvanus	2.950.000			2.950.000
4	Kab. Kotawaringin Barat	RSUD Sultan Imanudin Pangkalanbun	7.700.000			7.700.000
5	Kab. Barito Selatan	RSUD Buntok	2.950.000			2.950.000
6	Kab. Sampit	RSUD Dr. Murjani Sampit	3.000.000			3.000.000
7	Kab. Kapuas	RSUD Kapuas	7.000.000			7.000.000
8	Kab. Lamandau	RSUD Lamandau	10.000.000			10.000.000
	JUMLAH:		39.500.000	-	-	39.500.000
XXI	KALIMANTAN TIMUR					
1	Kota Samarinda	RSJ Samarinda	2.000.000			2.000.000
2	Kab Tarakan	RSUD Tarakan	8.000.000			8.000.000
3	Kab. Bulungan	Dinas Kesehatan Kabupaten	10.000.000			10.000.000
4	Kota Samarinda	RSUD Abdul Wahab Syahrani	19.500.000			19.500.000
	JUMLAH:		39.500.000	-	-	39.500.000
XXII	SULAWESI UTARA					
1	Kota Bitung	RSUD Kota Bitung	15.000.000			15.000.000
		Dinas Kesehatan Provinsi	3.000.000			3.000.000
	JUMLAH:		18.000.000	-	-	18.000.000
XXIII	SULAWESI TENGAH					
1	Kab. Banggai	RSUD Luwuk Banggai	5.000.000			5.000.000
2	Kab. Poso	Peningkatan Sarana DINKES	10.000.000			10.000.000
3	Kab. Toja Una-Una	RSUD Ampana	20.000.000			20.000.000
	JUMLAH:		35.000.000	-	-	35.000.000

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXIV	SULAWESI SELATAN					
1	Kota Makassar	RSUD Labuang Baji	5.000.000			5.000.000
		RSUD Siti Fatimah	9.000.000			9.000.000
		RS Haji Makassar	9.000.000			9.000.000
		RSUD Sayang Rakyat	10.000.000			10.000.000
2	Kab. Pinrang	Peningkatan Sarana DINKES	7.000.000			7.000.000
3	Kab. Barru	RSUD La Patarai Barru	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Selayar	Peningkatan Sarana DINKES	9.500.000			9.500.000
5	Kab. Bantaeng	RSUD HM Anwar Makatutu	20.000.000			20.000.000
6	Kab. Luwu	RSUD Batara Guru Belopa	14.000.000			14.000.000
7	Kab. Gowa	RSUD Gowa	5.000.000			5.000.000
8	Kab. TanaToraja	RSUD TanaToraja	3.500.000			3.500.000
9	Kab. Wajo	RSUD Wajo	1.000.000			1.000.000
10	Kab. Jeneponto	RSUD Kab. Jeneponto	29.300.000			29.300.000
11	Kab. Maros	RSUD Kab. Maros	14.400.000			14.400.000
12	Kab. Selayar	RSUD Selayar	10.000.000			10.000.000
13	Kab. Bulukumba	Peningkatan Sarana DINKES	20.000.000			20.000.000
14	Kab. Enrekang	RSUD Kab. Enrekang	19.540.000			19.540.000
15	Kab. Pangkep	RSUD Kab. Pangkep	14.400.000			14.400.000
16	Kab. Sidrap	RSUD Kab. Sidrap	20.000.000			20.000.000
17	Kab. Pinrang	RSUD Pinrang	18.000.000			18.000.000
	JUMLAH:		243.640.000	-	-	243.640.000
XXV	SULAWESI TENGGARA					
1	Kab. Kolaka Utara	RSUD Kolaka Utara	6.000.000			6.000.000
2	Kab. Konawe Utara	RSUD Kab. Konawe Utara	10.000.000			10.000.000
3	Provinsi Sulawesi Tenggara	RSU Propinsi Sulawesi Tenggara	5.000.000			5.000.000
4	Kab. Kolaka	RSUD Kolaka	10.000.000			10.000.000
	JUMLAH:		31.000.000	-	-	31.000.000
XXVI	GORONTALO					
1	Kab. Gorontalo Utara	RSUD Kab. Gorontalo Utara	10.000.000			10.000.000
	JUMLAH:		10.000.000	-	-	10.000.000
XXVII	SULAWESI BARAT					
1	Kab. Mamuju	RSUD Mamuju Utara	4.000.000			4.000.000
2	Provinsi Sulawesi Barat	RSU Sulawesi Barat	19.000.000			19.000.000
	JUMLAH:		23.000.000	-	-	23.000.000
XXVIII	MALUKU					
1	Seram Bagian Timur	RSUD SBT, Bula	4.000.000			4.000.000
2	Pulau Buru	RSUD Namlea	4.000.000			4.000.000
3	Buru Selatan	RSUD Namrole	6.000.000			6.000.000
4	Provinsi Maluku	RSUD Haulussy, Ambon	20.000.000			20.000.000
5	Kab. Maluku Tengah	Dinas Kesehatan Kabupaten	1.000.000			1.000.000
	JUMLAH:		35.000.000	-	-	35.000.000

Dalam Ribuan Rupiah

NO	SATUAN KERJA		RUPIAH MURNI	RM PENDAMPING	PHLN	JUMLAH
1	2		3	4	5	6
XXIX	**MALUKU UTARA**					
1	Kota Ternate	Peningkatan Sarana DINKES	7.500.000			7.500.000
2	Kab. Halmahera Barat	RSUD Jailolo	6.000.000			6.000.000
3	Kab. HalmaheraTengah	Peningkatan Sarana DINKES	10.000.000			10.000.000
JUMLAH:			**23.500.000**	-	-	**23.500.000**
XXX	**PAPUA**					
1	Kab. Abepura	RSUD Abepura	20.000.000			20.000.000
2	Kab. Keerom	RSUD Kwaingga Keerom	4.500.000			4.500.000
3	Kab Jaya Pura	RSUD Yowari Sentani	20.000.000			20.000.000
4	Kab. Jaya Wijaya	RSU Wamena	20.000.000			20.000.000
5	Kab. Asmat	RSUD Asmat	4.500.000			4.500.000
6	Kota Jaya Pura	RSUD Jaya Pura Dok 2	10.500.000			10.500.000
7	Kab. Merauke	RSU Merauke	5.000.000			5.000.000
		Dinas Kesehatan Kabupaten	2.000.000			2.000.000
8	Kab. Biak Numfor	RSUD Biak	15.000.000			15.000.000
JUMLAH:			**101.500.000**	-	-	**101.500.000**
XXXI	**PAPUA BARAT**					
1	Kab. Fak Fak	RSUD Fak Fak	24.000.000			24.000.000
2	Kab. Sorong Selatan	RSUD Scholoo Keyen	3.000.000			3.000.000
JUMLAH:			**27.000.000**	-	-	**27.000.000**
JUMLAH I S/D XXXI (SELURUH INDONESIA)			**1.680.930.000**	-	-	**1.680.930.000**

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH